



Peran Keswadayaan dalam Upaya Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan

Farah Nur Hamidah Mutia¹, Ririt Iriani Sri Setiawati², Mohammad Wahed³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 21 Oktober 2023
Revised : 27 Oktober 2023
Accepted: 01 November 2023

The high population growth rate is in line with the increasing poverty rate in Indonesia which results in the inability to meet the needs of the community for habitable housing. Pacitan Regency is one of the areas with a high poverty rate and also a lot of data on Uninhabitable Houses (RTLH). Therefore, it is necessary to have government assistance in meeting the needs of Livable Houses (RLH) for the community, especially in Kalikuning Village, which is located in Tulakan District. The government through the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program aims to be able to realize RLH for the people in Kalikuning Village, the implementation of this program is maximized by the role of self-help which is issued personally from the community. The purpose of this study was to determine the role of self-sufficiency in the effort to realize Livable Houses (RLH) in the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Kalikuning Village, Tulakan District, Pacitan Regency. The method used is descriptive qualitative by conducting analysis with various research methods. The results of the study show that community self-help plays a very important role in encouraging stimulants provided by the government in an effort to create Livable Houses (RLH) for the people in Kalikuning Village so that the process of building houses can be carried out and maximum results.

Keywords: *Self-help, Livable Houses, BSPS*

(*) Corresponding Author: ririt_upn@yahoo.com

How to Cite: Mutia, F. N. H., Setiawati, R. I. S., & Wahed, M. (2023). Peran Keswadayaan dalam Upaya Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077062>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak hingga menempati posisi ke empat di dunia, banyaknya penduduk di Indonesia dengan luas wilayah yang besar secara tidak langsung menciptakan keberagaman budaya, suku dan kelompok etnis yang ada di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk tentunya juga berpengaruh terhadap upaya pembangunan nasional, dimana pembangunan nasional ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat yang diupayakan oleh pemerintah dengan melakukan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia sendiri permasalahan besar yang masih terus menghantui adalah masalah kemiskinan, dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 mencapai 275.773,8 juta jiwa tentunya memicu munculnya permasalahan yang kompleks apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan hidup tiap masyarakatnya. Kemiskinan sendiri diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya (Nafi'ah, 2021). Masalah

kemiskinan ini menjadi masalah utama yang terjadi pada banyak negara utamanya pada negara-negara berkembang yang dimana pada setiap upaya pembangunan nasionalnya diikuti pula dengan kenaikan jumlah penduduk. Kemiskinan menjadi ukuran untuk menilai keberhasilan dari upaya pembangunan pada suatu negara. Oleh karena itu, fokus dari upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tertuju pada pengentasan masalah kemiskinan yang banyak mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Di Indonesia sendiri kemiskinan menjadi masalah yang selalu ada dari waktu ke waktu yang muncul karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan dan papan. 3 kebutuhan dasar kehidupan tersebut merupakan kebutuhan primer atau utama yang harus terpenuhi dalam hidup masyarakat sehingga dapat mendorong upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Salah satu wilayah khususnya di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi ialah Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah kurang lebih 1.389,8716 km² dengan kondisi geografisnya 85% berupa perbukitan. Di Kabupaten Pacitan sendiri sebagian besar dari wilayahnya berupa perbukitan dengan akses jalan yang terjal dengan jurang-jurang disampingnya. Disamping itu Pacitan disebut sebagai surga nya Jawa Timur, hal ini dikarenakan kekayaan dan keindahan alam Pacitan yang sangat luar biasa dengan banyaknya pantai yang sangat menakjubkan dan bukit-bukit nya yang menyajikan keindahan alam menjadi sebuah potensi yang besar bagi Kabupaten Pacitan. Dengan kondisi geografis tersebut mayoritas penduduk atau masyarakat Kabupaten Pacitan bekerja sebagai petani. Kemudian wilayah laut dari Kabupaten Pacitan ini langsung berbatasan dengan Samudera Hindia sehingga beberapa dari masyarakat bekerja sebagai nelayan. Sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi Kabupaten Pacitan menempati posisi ke 8 presentase kemiskinan tertinggi yang ada di Jawa Timur. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geografis yang tentunya tidak mudah untuk mobilitas masyarakatnya. Berikut data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) :

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan 2018-2022

Sumber: BPS, 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	78.600	75.860	80.820	84.190	76.930

Berdasarkan data jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang cenderung fluktuatif dengan jumlah yang sangat tinggi. Hal ini tentunya bukan masalah kecil bagi pemerintah Kabupaten Pacitan. Kemiskinan memberikan dampak luas pada berbagai aspek kehidupan manusia, dimana dalam menjalani kehidupan tentunya diperlukan pemenuhan atas kebutuhan dasar hidup yang dirangkum dalam 3 jenis yakni sandang, pangan dan juga papan. Dengan kondisi geografis Pacitan yang sebagian besar perbukitan tentunya membuat potensi bencana di Kabupaten Pacitan cukup besar, oleh karena perlu adanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa papan atau tempat

tinggal yang layak. Dengan kondisi masyarakat yang masih dalam golongan miskin maka tentunya masyarakat pun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah layak huninya sendiri. Disini peran pemerintah dibutuhkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumah Layak Huni (RLH) sangat penting bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat dimana rumah merupakan tempat dimana masyarakat hidup, beraktivitas dan bertumbuh kembang setiap harinya secara fisik dan juga pemikiran, oleh karena itu rumah berperan sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang akan membentuk kualitas dari masyarakat itu sendiri. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk memenuhi tempat tinggal yang sehat, aman dan nyaman bagi masyarakat karena dengan rumah dan lingkungan yang sehat akan mendorong peningkatan kesehatan masyarakat yang juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan bangsa. Sejalan dengan terus bertambah nya jumlah penduduk tentunya kebutuhan akan sebuah tempat tinggal yang layak juga meningkat secara signifikan.

Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sebuah upaya dengan menggagas sebuah program yang berorientasi kepada pembangunan khususnya Rumah Layak Huni (RLH) yakni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui salah satu unsur pelaksanaannya yakni Direktorat Jenderal Perumahan Kementrian PUPR berharap program BSPS dapat menjadi solusi dalam permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat mendorong keswadayaan masyarakat sebagai akses untuk dapat memenuhi kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) nya. Dalam pelaksanaannya program BSPS berasaskan atau memiliki prinsip gotong royong dengan objek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki atau tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Konsep keswadayaan dalam program BSPS dengan menggali keswadayaan dari penerima bantuan bertujuan untuk dapat memaksimalkan bantuan dari pemerintah dalam mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dengan sarana, prasarana dan utilitas (PSU) yang memadai dan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. Kabupaten Pacitan adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi pelaksana program BSPS ini. Di Pacitan sendiri berdasarkan data terakhir tahun 2022 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terdapat sebanyak 17.307 rumah yang tersebar pada berbagai kecamatan dan harus segera diatasi. Salah satu daerah pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pacitan ialah pada Desa Kalikuning yang terletak di Kecamatan Tulakan. Pelaksanaan program BSPS menggunakan konsep keswadayaan dimana dibutuhkan prakarsa atau upaya masyarakat dalam bentuk penyediaan swadaya tambahan untuk dapat memaksimalkan proses pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) nya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program BSPS ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk membantu memaksimalkan bantuan dengan penyediaan swadaya nya secara pribadi.

Berdasarkan data-data di atas, masih banyak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pacitan khususnya disini di Desa Kalikuning, Kecamatan

Tulakan yang diikuti dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Peran Swadaya dalam Upaya Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) pada Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan menganalisis suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Selain itu, data yang digunakan juga berupa data sekunder yang didapatkan melalui publikasi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik observasi keadaan yang sebenarnya di lapangan, wawancara dengan narasumber atau informan, kepustakaan yang sesuai dengan penelitian dan juga mengumpulkan dokumentasi yang faktual dan juga relevan sehingga didapatkan data-data penting yang dibutuhkan dan dapat dikaji serta diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir selalu ada pada setiap wilayah di Indonesia, kondisi ini memberikan dampak atau pengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat serta mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, disaat masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri maka kesejahteraan tidak dapat tercapai. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) ditegaskan dan dituliskan setiap warga negara berhak memiliki hidup yang sejahtera, memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik serta sehat. Untuk dapat mencapai kesejahteraan itu sendiri dibutuhkan pemenuhan atas kebutuhan dasar manusia yakni sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga dapat tercapainya kesejahteraan yang dimana indikator dari tercapainya kesejahteraan itu sendiri menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kesejahteraan dapat dinilai dengan konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, pendapatan, kesehatan anggota keluarga, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan dalam mendapatkan pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, keadaan tempat tinggal dan fasilitas tempat tinggal (Samud, 2018). Di era sekarang ini dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang berupasadang dan pangan, sudah jarang bahkan mungkin tidak ditemui lagi masyarakat yang tidak memakai pakaian (sandang) dan masyarakat yang benar-benar tidak makan (pangan), namun masih ditemukan masyarakat yang bertempat tinggal dilokasi dan dengan bangunan rumah yang tidak layak. Karena pada dasarnya rumah merupakan tempat dimana manusia bertumbuh kembang secara fisik dan pemikiran, peran tempat tinggal sangat penting dalam pembentukan

karakter dan kepribadian. Oleh sebab itu, pemenuhan terhadap rumah atau tempat tinggal yang layak sangat penting bagi masyarakat.

Masalah perumahan dan permukiman di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang sulit untuk terselesaikan dengan cepat dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak dan setiap tahunnya terus bertambah, hal ini pun menjadi salah satu pemicu meningkatnya kemiskinan di Indonesia yang juga berakibat terhadap ketidakmampuan terhadap pemenuhan tempat tinggal yang layak. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk dapat melakukan upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar akan sebuah tempat tinggal yang layak huni. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah pemenuhan atas rumah layak huni bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri perlu segera di upayakan oleh pemerintah sehingga diharapkan dengan adanya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tempat tinggal masyarakat dapat mendorong berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia dan mendorong tingkat kesejahteraan bangsa. Rumah tidak layak huni memiliki keterkaitan dengan kemiskinan yang ada di Indonesia, dimana kemiskinan itu sendiri merupakan suatu kondisi dimana suatu rumah tangga atau individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak, dengan angka kemiskinan yang masih menunjukkan angka cukup tinggi menjadi salah satu faktor belum sepenuhnya masyarakat Indonesia menempati atau bertempat tinggal dengan layak. Dengan keadaan ekonomi yang belum stabil atau cenderung rendah membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar papan nya. Oleh karena itu, perlu adanya fokus yang lebih untuk mengatasi atau mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia yang juga akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni menjadi salah satu tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, disaat upaya pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) dapat berhasil maka akan berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan yang memberikan dampak yang baik untuk kehidupan kedepannya.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggagas suatu program yang memiliki orientasi pada pembangunan di Indonesia yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memperhatikan 4 indikator Rumah Layak Huni (RLH) diantaranya :

- a. Ketahanan konstruksi bangunan
- b. Kecukupan luas tempat tinggal
 - Minimal 7,2 meter/orang
 - Tinggi ruang minimal 2,8 meter
- c. Akses air minum layak
- d. Akses sanitasi layak
 - MCK dan septitank
 - Tempat sampah
 - Saluran pembuangan air kotor
 - Saluran pembuangan limbah
- e. Aspek kesehatan yang baik

- Penghawaan min 5%
- Pencahayaan min 10%

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan pemerintah yang sasaran utamanya ialah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan untuk dapat mendorong keswadayaan dari masyarakat untuk dapat memiliki akses dalam memenuhi kebutuhandasar Rumah Layak Huni (RLH) dan lingkungan yang sehat serta dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai secara swadaya dengan berasaskan gotong rotong. Program BSPS ini berupa sebuah bantuan stimulan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kemudian dimaksimalkan dengan swadaya dari masyarakat itu sendiri melalui upaya penggalan keswadayaan masyarakat. Program BSPS ini menjadi sebuah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berupa bantuan stimulan yang dimaksudkan pemerintah dapat mendorong atau menggerakkan keswadayaan dari penerima bantuan, keswadayaan yang dimaksud disini ialah sebuah upaya atau usaha dari penerima bantuan atau masyarakat untuk membantu memaksimalkan berjalannya program. Perumahan swadaya yang digagas oleh pemerintah ini merupakan rumah-rumah yang tercipta atau terwujud dengan upaya dan atau prakarsa dari masyarakat itu sendiri. Objek dari program BSPS ialah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kerusakan diatas 50% dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) yang memiliki penghasilan paling banyak sebesar UMP/UMK dengan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utamanya. Rumah Layak Huni (RLH) yang dibuat diharapkan dapat dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan sesuai dengan standart seperti listrik, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, dan proteksi kebakaran. Program BSPS ini memberikan bantuan kepada masyarakat untuk dapat mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) nya dengan bantuan berupa uang senilai 20 juta rupiah dimana diantaranya 17,5 juta disalurkan dalam bentuk bahan bangunan yang langsung dibayarkan pada toko bangunan terpilih dan 2,5 juta rupiah bantuan untuk pembayaran upah tukang. Untuk dana kebutuhan di luar bantuan dimaksimalkan dengan adanya swadaya masyarakat, swadaya sendiri ini ialah suatu upaya pribadi dari masyarakat dengan mengerluarkan hartanya untuk membantu memaksimalkan pembangunan, bentuk dari swadaya dapat bermacam-macam yakni seperti material atau bahan bangunan yang dimiliki, material atau bahan bangunan rumah lama yang dapat dimanfaatkan kembali, hasil pertanian, hewan ternak, tabungan pribadi, dukungan dari sanak saudara dan gotong royong dari warga sekitar. Penggalan keswadayaan ini dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) secara langsung kepada masyarakat dengan melakukan identifikasi langsung terjun ke lapangan atau rumah masyarakat, namun sebelum itu juga dilakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai program BSPS ini secara konsep dan proses pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana program ini dijalankan untuk mengukur pula kesanggupan dari masyarakat menerima bantuan ini. Pada dasarnya program BSPS ini dibuat dengan prinsip gotong rotong sehingga nilai swadaya juga dapat berupa gotong-royong uluran tangan dari sanak saudara atau tetangga dan warga sekitar lingkungan tempat tinggal penerima bantuan. Swadaya disini berperan

sebagai pendorong dari stimulan yang diberikan pemerintah sehingga dapat memaksimalkan proses pembangunan Rumah Layak Huni (RLH).

Kabupaten Pacitan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang menjadi pelaksana program BSPS. Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur yang memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur dan perbukitan dengan medan dan jurang yang terjal serta termasuk deretan pegunungan seribu. Kabupaten Pacitan memiliki sebanyak 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa dengan 5 kecamatan diantaranya berada di atas bukit dengan ketinggian 50 mdpl kebawah sedangkan untuk 7 kecamatan lainnya berada pada ketinggian 300 mdpl lebih. Kabupaten Pacitan menjadi salah satu dari kabupaten di Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Pacitan mencapai 76.930 jiwa dan angka tersebut tiap tahunnya cenderung fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih tergolong tinggi, apabila dilihat dari kondisi geografisnya salah satu yang menghambat pembangunan di Kabupaten Pacitan adalah karena kondisi geografisnya yang cukup susah, contohnya ialah pada daerah-daerah di atas bukit yang sulit untuk dijangkau tentunya akan menyebabkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan yang berakibat kepada angka kemiskinan yang tidak kunjung terselesaikan. Dengan tingginya angka kemiskinan berarti masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan atas kebutuhan dasar hidupnya. Pada dasarnya kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek, seperti halnya pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal dan lainnya. Kondisi masyarakat yang berada pada garis kemiskinan membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, apalagi dengan kondisi Pacitan yang rawan akan bencana alam suatu kelayakan dari tempat tinggal merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keselamatan penghuninya. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah setempat untuk dapat membantu masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat.

Kondisi tersebut terjawab dengan pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Pacitan, salah satu daerah di Kabupaten Pacitan yang menjadi pelaksana program ini ialah pada Desa Kalikuning yang berada di Kecamatan Tulakan. Kecamatan Tulakan termasuk kecamatan yang tidak terlalu jauh dari pusat kota dengan jarak kurang lebih 27 km. Di Desa Kalikuning sendiri terdapat sebanyak 6 dusun dengan mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani dan beberapa memiliki hewan ternak dengan penghasilan perbulan berkisar antara 500.000 – 1.500.000 ribu rupiah per bulan. Perekonomian di Desa Kalikuning masih tergolong rendah, sehingga banyak dari masyarakat yang hidup di rumah dengan kondisi yang tidak layak huni karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak. Pada Pelaksanaan program BSPS di Desa Kalikuning pada tahun 2023 awal terdapat sebanyak 23 masyarakat yang menjadi Penerima Bantuan (PB) BSPS ini yang tersebar dari berbagai dusun. Berikut data 23 Penerima Bantuan (PB) di Desa Kalikuning :

Tabel 2 Daftar Penerima Bantuan (PB) Desa Kalikuning

Sumber: Dokumen pribadi penulis

NO.	Nama	Alamat
1.	Sumiyem	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
2.	Boyani	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
3.	Rianto	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
4.	Slamet Wiyono	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
5.	Wiyadi	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
6.	Mursyid	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
7.	Sugiyarto	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
8.	Sujarno	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
9.	Sidik Purnomo	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
10.	Sumo Wiyono	Dusun Ngambar, Desa Kalikuning
11.	Sarino	Dusun Ngambar, Desa Kalikuning
12.	Jumali	Dusun Ngambar, Desa Kalikuning
13.	Suratni Aditya	Dusun Mloko, Desa Kalikuning
14.	Jumiyem	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
15.	Sumini	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
16.	Paini	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
17.	Hariyanto	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
18.	Joko Sulistiyo	Dusun Sono, Desa Kalikuning
19.	Katmiatin	Dusun Sono, Desa Kalikuning
20.	Sumi	Dusun Sono, Desa Kalikuning
21.	Rumiyah	Dusun Sono, Desa Kalikuning
22.	Edy Prayitno	Dusun Kepek, Desa Kalikuning
23.	Mursid	Dusun Kepek, Desa Kalikuning

Dengan konsep program BSPS yang memaksimalkan stimulan dengan melakukan penggalian keswadayaan masyarakat didapatkan sejumlah swadaya yang membantu dalam proses pelaksanaan program khususnya pada proses pembangunan, penggalian keswadayaan dilakukan kepada masing-masing penerima bantuan dan didapatkan beberapa swadaya yang berupa bahan material yang dimiliki oleh PB, bahan material lama yang masih bisa digunakan dan juga hewan ternak. Konsep swadaya dalam program BSPS ini merupakan sebuah upaya dalam menggerakkan atau mendorong keswadayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat turut andil dalam kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat sehingga kedepannya mampu untuk lebih mandiri, mewujudkan kemajuan dan juga kesejahteraan hidupnya. Pada dasarnya jumlah bantuan sebesar 20 juta tentunya nominal yang dapat dikatakan belum sepenuhnya mencukupi untuk pembangunan rumah sehingga pemerintah membuat program BSPS ini dengan kebijakan berupa melakukan penggalian keswadayaan dari masyarakat atau penerima bantuan yang bersangkutan. Konsep penggalian keswadayaan ini berupa sebuah upaya dari masyarakat atau penerima bantuan tersebut dalam memaksimalkan upaya menciptakan Rumah Layak Huni (RLH) dengan mengupayakan pemenuhan terhadap beberapa hal yang tidak dapat terpenuhi secara sepenuhnya dengan bantuan stimulan melalui pengoptimalan dengan harta yang dimiliki untuk dapat memaksimalkan pembangunan rumah.

Konsep dari swadaya ini jika dilihat dari kacamata ekonomi dapat berupa

pemindahan atau pengalihan nilai harta, dimana contohnya penjualan hewan ternak untuk memaksimalkan pembangunan sehingga pemindahan nilai harta berupa hewan ternak menjadi sebuah rumah yang memiliki kegunaan dan manfaat jangka panjang bahkan jika dilihat dari nilai jual rumah yang semakin lama semakin naik dapat dikatakan pula dengan swadaya tersebut maka nilai harta yang dipindahkan mengalami kenaikan nilai. Hasil dari identifikasi langsung kepada para penerima bantuan di Desa Kalikuning berhasil didapatkan swadaya dari para penerima bantuan dari harta- harta yang dimiliki, besar swadaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan Desa Kalikuning berkisar antara 20 – 30 juta rupiah tiap penerima bantuan. Keberhasilan pada proses penggalian swadaya membantu proses pembangunan rumah dapat berjalan dengan maksimal dan dapat terbangun hingga selesai dan sesuai dengan ketentuan Rumah Layak Huni (RLH) yang telah ditetapkan. Angka tersebut bukan angka yang kecil yang dikeluarkan oleh masyarakat, dimana berarti stimulan yang diberikan pemerintah berhasil menggerakkan swadaya masyarakat sehingga didapatkan keswadayaan yang cukup besar untuk membantu proses pembangunan rumah. Hasil dari bantuan stimulan yang dimaksimalkan swadaya masyarakat mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan sehingga dihasilkan rumah yang sehat, aman dan nyaman. Berikut salah satu bukti hasil pembangunan rumah salah satu Penerima Bantuan (PB) atas nama Bapak Slamet Wiyono di Desa Kalikuning :



Gambar 1 Rumah Sebelum dan Sesudah Pembangunan

Sumber: Dokumen pribadi penulis

Gambar di atas menjadi bukti pelaksanaan BPS di Desa Kalikuning yang berhasil menciptakan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat dengan memaksimalkan stimulan dengan menggali keswadayaan penerima bantuan. Dengan adanya upaya dari masyarakat untuk turut serta bekerjasama dengan pemerintah mampu menciptakan Rumah Layak Huni yang sesuai dengan ketentuan dan rumah serta lingkungan yang sehat dan aman. Hal ini membuktikan adanya peran penting dari keswadayaan dalam membantu memaksimalkan bantuan stimulan yang diberikan oleh pemerintah sehingga mampu mewujudkan sebuah bangunan rumah yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat yang tentunya harus dilengkapi dengan sarana, parasarana dan utilitas (PSU) yang memadai. Keswadayaan memberikan pengaruh yang besar dalam upaya mewujudkan RLH, dengan adanya swadaya dari masyarakat beberapa hal dan aspek yang mungkin belum sepenuhnya dapat terpenuhi dengan bantuan stimulan

dari pemerintah dapat dimaksimalkan kembali, keduanya memiliki peran yang sama pentingnya dimana bantuan stimulan mampu mendorong keswadayaan masyarakat bantuan dimana disini masyarakat mendapatkan peluang untuk memperbaiki tempat tinggalnya dengan biaya yang tidak terlalu besar karena dibantu oleh adanya stimulan pemerintah hingga terwujudnya RLH bagi penerima bantuan.

Peran penting sebuah swadaya dalam program pembangunan RLH ini dibuktikan dengan keberhasilan pembangunan rumah tidak layak huni pada masyarakat Desa Kalikuning, disini swadaya masyarakat sangat membantu dalam proses pembangunan rumah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada proses pembangunan yang masih kurang. Dengan terciptanya Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat melalui program BSPS diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya dalam hal kesehatan, perekonomian dan sebagainya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Meskipun di samping segala keberhasilan pelaksanaan program tentunya masih ditemukan kendala-kendala dan ketidaksesuaian dalam proses pengimplementasian program BSPS ini, namun hal tersebut dapat menjadi sebuah evaluasi untuk pelaksanaan program BSPS kedepannya sehingga dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Program BSPS menjadi pembuka jalan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki akses memperbaiki huniannya dan bertempat tinggal dengan layak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan terus meningkatnya jumlah penduduk apabila tidak diikuti dengan pemenuhan atas kebutuhan dasar hidup masyarakat akan menyebabkan semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Masyarakat miskin ialah masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Pada dasarnya pemenuhan atas kebutuhan dasar hidup berupa sandang, pangan dan papan merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi yang berada pada garis kemiskinan membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang berupa Rumah Layak Huni (RLH) yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai sehingga tercipta rumah yang aman, nyaman dan sehat. Di Indonesia khususnya di Kabupaten Pacitan masih banyak ditemukan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditempati oleh masyarakat, hal ini tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk dapat mewujudkan RLH bagi masyarakatnya sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya pada salah satu unsur pelaksanaannya yakni Direktorat Jenderal Perumahan menggagas sebuah program yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan sebuah bantuan pemerintah berupa dana stimulan untuk mewujudkan Rumah Layak Huni masyarakat yang dimaksimalkan dengan keswadayaan masyarakat itu sendiri. Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan menjadi salah satu wilayah yang menjadi

pelaksana program BSPS dengan mengimplementasikan konsep swadaya dari masyarakat hingga dapat tercipta Rumah Layak Huni (RLH) dengan PSU yang memadai dengan tujuan memberikan keamanan, kenyamanan dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Peran penting swadaya dibuktikan dengan berhasil terbangunnya 23 rumah Penerima Bantuan di Desa Kalikuning yang dimaksimalkan dengan swadaya pribadi masing-masing penerima bantuan. Keswadayaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan rumah, dengan adanya swadaya beberapa aspek yang belum terpenuhi secara utuh dapat terpenuhi dengan baik sehingga dapat dihasilkan rumah yang terbangun dengan maksimal dan sesuai dengan ketentuan Rumah Layak Huni (RLH) yang sesuai dengan ketentuan Program BSPS.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diajukan saran dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) perlu benar-benar diperhatikan kesanggupan dari calon penerima bantuan, karena konsep dari program BSPS ini penerima bantuan juga harus mengupayakan keswadayaannya sehingga perlu diperhatikan apakah penerima bantuan yang bersangkutan bersedia dan sanggup. Karena apabila hal ini tidak diperhatikan, bantuan yang mulanya bertujuan untuk memberikan solusi atas sebuah permasalahan yang dialami masyarakat dapat menjadi beban dan permasalahan baru bagi masyarakat yang tidak siap dalam swadaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang maksimal dan pendampingan secara maksimal untuk benar-benar menyalurkan program bantuan ini sesuai atau tepat sasaran dan dihasilkan hasil yang maksimal serta tujuan dari program dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288-295.
- Arfiani, D. (2020). *Berantas Kemiskinan*. Alprin.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan 2018-2022.
- Khairunisa, I., & Hayati, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(2), 1324- 1435.
- Lampiran I SE Nomor 14/SE/Dr/2022 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
- Lampiran II SE Nomor 14/SE/Dr/2022 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejahtera dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 953-960.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>

- Nuryanto, N., Kartiningrum, B., Primadi, M. P., Pindi, K. A. R., Nugroho, T., & Widayanti, S.(2022). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 6(2), 155-165.
- Rahayu, S. B. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) DiJawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20(3), 25-44.
- Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3565>